

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir seluruh perusahaan memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan mulai bersaing untuk mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin, sehingga dapat memenuhi target permintaan konsumsi masyarakat dapat mencapai tujuan ekspansi dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (*firm performance*).

Kinerja keuangan perusahaan yang baik juga bermakna bagi para konsumen, karyawan, komunitas, dan pemasok termasuk dalam pemasok adalah kreditur yaitu pemasok dana. Kesejahteraan pihak *stakeholder* merupakan salah satu bentuk tujuan sekunder didirikannya perusahaan (Khaira, 2011). Perusahaan bertujuan dengan memaksimalkan laba diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Namun mengukur kinerja keuangan dengan melihat keputusan ekonomi saja tidak cukup. Eipstein dan Freedman (1994), dalam Anggraini (2006), mengungkapkan bahwa para investor individual lebih tertarik dengan informasi sosial yang telah dilaporkan dalam laporan tahunan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sarana prasarana yang dapat memberikan informasi mengenai aspek- aspek sosial, lingkungan dan keuangan secara sekaligus,

karena keberadaan perusahaan secara langsung ataupun tidak memiliki dampak yang dapat dirasakan bukan hanya bagi investor saja.

Survei global yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dari berbagai organisasi menjadikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Warta Ekonomi, 2006). Keputusan yang diambil eksekutif senior banyak yang justru lebih menguntungkan manajemen dan mengesampingkan kepentingan *stakeholders*, khususnya pemegang saham. Kesenjangan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Healy dan Palepu (1983) menyatakan bahwa pengungkapan merupakan salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi dapat dikurangi dengan tanggung jawab sosial (CSR) yang diungkapkan dalam *CSR disclosure* atau sering disebut sebagai *Corporate Social Reporting*.

Akuntansi konvensional hanya bertujuan kepada maksimalisasi keuntungan perusahaan. Saat ini, perusahaan dituntut untuk memperhatikan peran *stakeholder*, sehingga perusahaan harus dapat menyelaraskan antara perusahaan dengan *stakeholder* dengan mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Hadi (2011) mengatakan bahwa isu lingkungan ini merupakan suatu bukti nyata dari kerusakan lingkungan dan emisi industrialisasi. Perusahaan pada saat ini melaporkan aktivitas sosial dan lingkungannya dalam laporan keuangan.

Menurut Verecchia (1983) dalam Basalamah (2005) dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut meningkatkan kinerja perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi isu yang banyak dibicarakan di lingkungan masyarakat, CSR dilakukan karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungan yang memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan usaha. Eksistensi perusahaan akan memiliki dampak positif ataupun negatif bagi masyarakat. Perusahaan harus mencegah hal-hal negatif yang mungkin dilakukan oleh masyarakat seperti klaim (legitimasi) dari masyarakat (Hadi, 2011).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah suatu proses penyampaian dari dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan ekonomi perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Kewajiban perusahaan atas CSR telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah bagi setiap perusahaan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitar. Menurut CSR Forum *corporate social responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan.

Tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) masih menjadi masalah dalam bisnis yang terjadi saat ini, meskipun sudah lebih dari sepuluh tahun krisis di Asia terjadi. Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh

Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (*The World Bank*, 1998, dalam Oktapiyani, 2009).

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* dimana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Manajer dengan informasi yang dimilikinya bisa bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmetry information*). Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut.

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu aturan yang mengarahkan semua elemen perusahaan untuk berjalan bersama-sama guna mencapai tujuan perusahaan (Hafidzah, 2013). GCG diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat

memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, implementasi dari GCG diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan (Retno dan Priantinah, 2012).

Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa *good corporate governance* mengandung empat nilai utama yaitu: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Pengertian lainnya dari *Finance Committee on Corporate Governance* menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para pemegang saham.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *good corporate governance* adalah (1) suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, dan para pemegang saham, (2) suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yakni pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan, (3) suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya. Dalam pelaksanaan GCG harus didukung oleh seluruh organ yang ada di dalam perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris yang akan mengawasi kinerja dari manager perusahaan, Komite Audit sebagai perantara antara auditor internal dan eksternal agar sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, dan Kepemilikan

Institusional untuk mengawasi perusahaan dengan saham yang dimiliki, serta komite-komite lainnya yang membantu dalam penerapan GCG.

Keterkaitan perusahaan dengan daerah lingkungan sosialnya menuntut dipenuhinya pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) sehingga diperlukannya tata kelola usaha yang baik (GCG). Melalui pelaksanaan CSR dan GCG, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan, masyarakat, investasi sosial perusahaan, kinerja keuangan perusahaan dan akses capital serta citra perusahaan di mata publik menjadi baik.

Penerapan GCG dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Dey Report (1994) dalam Kusumawati, Dwi Novi dan Bambang Riyanto (2005) mengemukakan bahwa corporate governance yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham.

Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan itu merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif.

Seorang investor selalu mengharapkan profit dalam investasinya, maka dari itu kinerja perusahaan juga menjadi hal yang diperhatikan investor. Salah satu kinerja perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan adalah *Return On*

Equity. Nurmalasari dalam Hutami (2012: 110) menyatakan bahwa ROE merupakan salah satu alat utama investor yang paling sering digunakan dalam menilai suatu saham. “ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) atas modal yang diinvestasikan dalam perusahaan” (Syamsuddin, 2011: 64).

Jika CSR dilaksanakan maka GCG akan memadai, karena dengan dilakukannya CSR pada lingkungan perusahaan maka akan dapat memberi jaminan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti judul **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUNGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan?

4. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan?
5. Bagaimana pengaruh CSR, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh CSR, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Hasil penelitian

diharapkan memberikan pandangan dan pemahaman lebih mendalam mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial, serta dapat memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG).

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019
2. Kinerja keuangan diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE)
3. Pengukuran *Good Corporate Governance* mencakup 3 kategori, yaitu
 - a) Dewan Komisaris Independen
 - b) Komite Audit

c) Kepemilikan Institusional

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Junda Muhammad, 2018) dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis perusahaan dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

Perbedaan selanjutnya terletak pada variabel dependen, peneliti sebelumnya menggunakan variabel dependen yaitu nilai perusahaan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen kinerja keuangan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini diuraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian yang relevan yang menjadi referensi penulis, serta kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan salah satu dasar yang digunakan untuk memahami *good corporate governance*. Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih (*principal*) meminta kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi keuntungan *principal*. Teori agensi bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat, teori agensi ini diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan investor bahwa mereka akan memperoleh *return* atas investasinya tersebut. teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen dengan agen yang secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan atau profit para pemilik. Penerapan mekanisme *good corporate governance* ditujukan untuk mengurangi terjadinya *agency problem*. Penerapan *good corporate governance* dapat membantu mengurangi peluang bagi manajer untuk berperilaku menyimpang dan memperkaya diri sendiri.

Tujuan utama teori agensi adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Hubungan keagenan ini adalah terdapat pemisah antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Permasalahan keagenan yang terjadi

didalam perusahaan dapat diatasi dengan diterapkannya *good corporate governance* (GCG). GCG dalam hal ini berperan penting dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bagi pemegang saham, GCG memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan pada perusahaan dikelola dengan baik dan akan memberikan *return* yang memadai. Upaya tersebut akan menimbulkan biaya keagenan yang harus dikeluarkan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling biaya keagenan yang timbul terdiri dari:

- a) *The monitoring expenditure by the principal (monitoring cost)*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku dari *agent* dalam mengelola perusahaan
- b) *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk menjamin bahwa *agent* bertindak untuk kepentingan *principa*.
- c) *The residual loss*, yaitu nilai kerugian yang dialami *principal* akibat keputusan yang diambil oleh *agent* yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh *principal*.

2.1.2 Legitimacy Theory

Legitimasi Theory didasari oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Teori ini dibutuhkan perusahaan untuk peroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Teori ini dibutuhkan oleh perusahaan-

perusahaan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan masyarakat luas. Teori ini menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.

Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Sehingga tujuan metode operasi dan output organisasi harus sesuai dengan norma dan nilai sosial. Teori Legitimacy merupakan pusat kontrak sosial baik secara implisit maupun eksplisit, perusahaan mempunyai kontrak dengan masyarakat secara keseluruhan dan kontrak sosial diungkap kan melalui harapan masyarakat yang tidak tetap selamanya dan berubah dari waktu ke waktu (Deegan,2008).

Teori legitimasi ini sesuai dengan variabel *corporate social responsibility* yang merupakan suatu bentuk pengabdian perusahaan untuk menyisihkan sebagian harta perusahaan untuk mengecilkan dampak negatif yang kemungkinan dapat terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan dan upaya perusahaan untuk meningkatkan dampak positif dari operasi perusahaan terhadap semua pihak yang berkepentingan terutama pihak sosial dan lingkungan.

2.1.3 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Pengertian dan Tujuan Kinerja Keuangan

Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu

perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Menurut Prasetyo yang dikutip oleh Putri Hidayatul Fajrin (2016) menyebutkan unsur dari kinerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan pada laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagian dasar bagi ukuran lainnya.

Fahmi (2012:2) yang dikutip oleh Marsel Pongoh (2013) menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.

2.1.3.2 Pengguna Laporan Keuangan

a) Investor

Para investor berkepentingan terhadap resiko yang melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang dilakukan. Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan melakukan penilaian kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

b) Karyawan

Karyawan memerlukan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, sehingga dengan informasi ini memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

c) Kreditor (Pemberi Pinjaman)

Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

d) Pemasok dan Kreditor Lainnya

Pemasok dan kreditor lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar saat jatuh tempo.

e) Pelanggan

Pelanggan berkepentingan dengan informasi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika terlibat dalam perjanjian jangka panjang.

f) Pemerintah

Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas perusahaan. Selain itu untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional.

2.1.3.3 Ukuran Kinerja Keuangan

Analisis rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan ruang lingkungannya, yaitu:

a) Rasio Likuiditas

Rasio ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari: *Current Ratio*, *Quick Ratio* dan *Net Working Capital*.

b) Rasio Solvabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari: *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Capitalization Ratio*, *Times Interest Earned*, *Cash Flow Interest Coverage*, *Cash Flow to Income*, dan *Cash Return on Sales*.

c) Rasio Aktivitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya. Rasio aktivitas terdiri dari: *Total Asset Turnover*, *Fixed Asset Turnover*, *Avvound Recaifable Turnover*, *Inventory Turnover*, *Average Collection Period* dan *Day's Sales Inventory*.

d) Rasio Profitabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang terdiri dari : *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return on Asset*, *Return on Equity*, dan *Oporating Ratio*.

e) Rasio Pasar

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan dan diungkapkan dalam basis persaham. Rasio pasar terdiri dari: *Dividen Yieled*, *Dividen per Share*, *Dividen Payout Ratio*, *Price Earning Ratio*, *Earning per Share*, *Book Value per Share*, dan *Price to Book Value*.

Dari kelima rasio keuangan tersebut, yang berkaitan langsung dengan analisis kinerja keuangan perusahaan yang di jadikan bahan pertimbangan pertama kali oleh investor adalah rasio profitabilitas yang diperoduksikan oleh Return on Asset (ROE) yaitu rasio keuangan yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan modal tertentu. ROE merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal yang di miliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut rentabilitas modal sendiri. Rasio ini di gunakan untuk mengukur kenerja keuangan manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Analisis profitabilitas ini memberiiikan jawaban akhir tentang efektif tidaknya suatu perusahaan (J.Fred.Weston dan Thomas E.Copeland, 2002;241).

Salah satu alasan utama perusahaan beroperasi dalam menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham,ukuran yang di gunakan dalam pencapaian alasan ini adalah tinggi rendahnya angka ROE yang berhasil di capai. Semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk para pemegang saham. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba untuk para pemegang saham.

2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.1.4.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Prasetyo dan Huda (2011;17) CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersihkan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana di ketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak di sengaja apalagi yang di sengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang di buat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik.

Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang di wujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang di tetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (Cheng Megawati dan Yulius Jogi Christiawan;2011).

Definisi umum menurut *World Business Council in Sustainable Development*, *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan secara meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya serta kualitas dan masyarakat luas

Dengan CSR perusahaan di harapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan masyarakat, investasi sosial perusahaan dimata publik menjadi baik, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan akses kapital. Dalam aktifitasnya setiap perusahaan akan berintraksi dengan lingkungan sosialnya. Akibat dari interaksi itu menuntut adanya timbal balik antara perusahaan dan lingkungan sosialnya yang beeimplikasi pada timbulnya dampak-dampak sosial atas kegiatan operasi perusahaan pada lingkungannya. Sepanjang perusahaan menggunakan sumber daya manusia yang komunitas yang ada, maka perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan profit dan mengembalikan profit tersebut bagi masyarakat.

2.1.4.2 Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Ruang lingkup *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan merupakan pengklasifikasian dari bidang-bidang utama perusahaan perseroan atas perbuatan sosial untuk memudahkan perusahaan dalam mengetahui item-item mana saja yang merupakan tanggung jawab sosialnya, klasifikasi tersebut meliputi :

- a) Klasisifikasi yang melibatkan masyarakat

Mencakup aktivitas yang pada dasarnya menguntungkan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, program pemberian makanan, serta perencanaan dan perbaikan masyarakat.

b) Klasifikasi sumber daya manusia

Mencakup bidang-bidang yang menguntungkan karyawan seperti program pendidikan dan pelatihan kebijakan, kenaikan pangkat serta tunjangan karyawan.

Klasifikasi sumber daya fisik dan sumbangan lingkungan

Mengenai kualitas udara dan air serta pengendalian polusi maupun pelestarian lingkungan hidup.

c) Klasifikasi sumber daya fisik dan sumbangan lingkungan

Mengenai kualitas udara dan air serta pengendalian polusi maupun pelestarian lingkungan hidup.

d) Klasifikasi sumbangan produk dan jasa

Memperhatikan pengaruh produk atau jasa perusahaan terhadap masyarakat dengan memperhitungkan beberapa pertimbangan seperti kualitas produk, pembungkusan produk, pengiklanan produk, ketentuan garansi produk dan keamanan produk.

2.1.5 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.5.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Kata *governance* berasal dari Prancis, *governance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain menjadi *corporate governance*, dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Istilah *good corporate governance* pertama kali di perkenalkan oleh *cadbury committe* di tahun 1992 yang menggunakan istilah

tersebut dalam laporan mereka yang kemudian di kenal dengan *cadbury report*. Laporan ini di pandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik *good corporate governance* di seluruh dunia.

Menurut bank dunia, GCG adalah aturan standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*ceck and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Indikator mekanisme GCG yang digunakan adalah jumlah anggota dewan direksi dan dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang ditetapkan dalam jumlah satuan. Semakin banyak dewan direksi dan dewan komisaris maka mekanisme dalam memonitoring manajemen akan semakin baik, tentunya kepercayaan para pemegang saham juga akan semakin tinggi kepada perusahaan. Indikator mekanisme GCG lain yang digunakan adalah komite audit, komite audit diukur dengan anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan. Mekanisme GCG terdiri dari mekanisme internal dan eksternal. mekanisme internal adalah cara dalam mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, pertemuan *board of director* dan keberadaan komite audit

Menurut Keasy, Good Corporate Governance merupakan sebuah struktur, proses, budaya dan sistem untuk menciptakan kondisi operasional yang sukses

bagi suatu organisasi (Sunatro dalam Haris 2008). Koesnohadi (dalam Haris 2008) mengatakan bahwa “*good corporate governance is relationship among stake holders that is used to determine and control the strategic direction and performance of organization*”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa good corporate governance merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan agar menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengedepankan keadilan bagi semua *stakeholders*, transparansi mengenai kondisi perusahaan sebagai bagian lingkungan eksternal (Haris,2008).

2.1.5.2 Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

Tujuan good corporate governance secara umum adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semuapihal yang berkepentingan, yang secara tegas oleh global *corporate governance* adalah menjadi sebuah isu penting dunia. Organisasi mempunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi sosial. GCG adalah mesinnya pertumbuhan global, pertanggungjawaban penyedia kerja, pelayanan publik dan privat, pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur. Sekarang ini, efisiensi akan pertanggungjawaban organisasi tidak peduli apakah organisasi publik atau privat. Good governance telah menjadi agenda pokok internasional.

The Indonesian institute for corporate governance (IICG) mengungkapkan tujuan dari *good corporate governance*;

- 1 Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional serta internasional.

2. Memenuhi tuntutan standar global
3. Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang pengelolaan.
4. Meminimalkan cost of capital dengan menekan resiko yang dihadapi kreditor.
5. Meningkatkan nilai saham perusahaan.
6. Meningkatkan citra perusahaan dimata publik.

Good Corporate Governance dapat memberikan acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif dalam melaksanakan operasional perusahaan. Menurut Sutojo dan Aldridge *Good Corporate Governance* mempunyai lima macam tujuan utama, kelima tujuan tersebut sebagai berikut:

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham.
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan.
- e. Meningkatkan mutu hubungan dewan pengurus dengan manajemen perusahaan.

2.1.5.3 Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG)

- a. *Transparasi* (Keterbukaan)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas memfokuskan pada pentingnya sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder*. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Responsibilitas merupakan tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan.

d. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip independen merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip dasar keadilan merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.5.3 Praktek *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada pemegang saham. Dengan demikian, penerapan *Good Corporate Governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Praktek *Corporate Governance* antara lain meliputi keberadaan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit.

a) Dewan Komisaris Independen

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak

manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan memberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memilih akses informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyatakan bahwa peran komisaris independen diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktek GCG para perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN. Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris (Lai, 2005 dalam Andayani, 2010).

Menurut (Sukrisno dan Cenik, 2014) komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Komisaris independen dipilih berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) keputusan dalam RUPS tidak berdasarkan pada jumlah suara yang biasanya satu orang satu suara tetapi berdasarkan pada jumlah saham yang

dimilikinya. Komisaris independen memiliki tugas yakni melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi sehingga komisaris independen memiliki fungsi yaitu mengawasi kualitas informasi atas kinerja dewan direksi dan juga untuk mengawasi kelengkapan laporan atas kinerja dewan direksi. Pihak ini tersebut dewan komisaris independen memiliki posisi yang sangat penting dalam perusahaan.

b) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan investment banking. Bila dihubungkan dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen yang lebih baik dibandingkan secara individual. Monitoring yang dilakukan pihak institusi tentu lebih efektif dibandingkan oleh pihak individu karena institusi memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar sehingga mampu melakukan monitoring yang lebih kuat. Hal ini menyebabkan dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih cepat, dan untuk menghindari berkurangnya relevansi dari informasi tersebut.

c) Komite Audit

Menurut Tugiman (1995) dalam Novi (2010), pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab

untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Komite audit merupakan organ yang dibentuk oleh dewan komisaris / dewan pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota yang dipimpin oleh seorang komisaris independen. Seperti komite pada umumnya, komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, komite audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin anggota komite audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan sampel.

Menurut *Sarbanes Oxley act* yang dikutip Sutojo dan Aldridge (2005) dalam Novi (2010) jumlah anggota komite audit perusahaan mengharuskan bahwa: “komite audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun, mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik, tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua komite audit dipegang oleh salah seorang anggota komite akuntan publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun”.

2.2 Hasil Penelitian Relevan

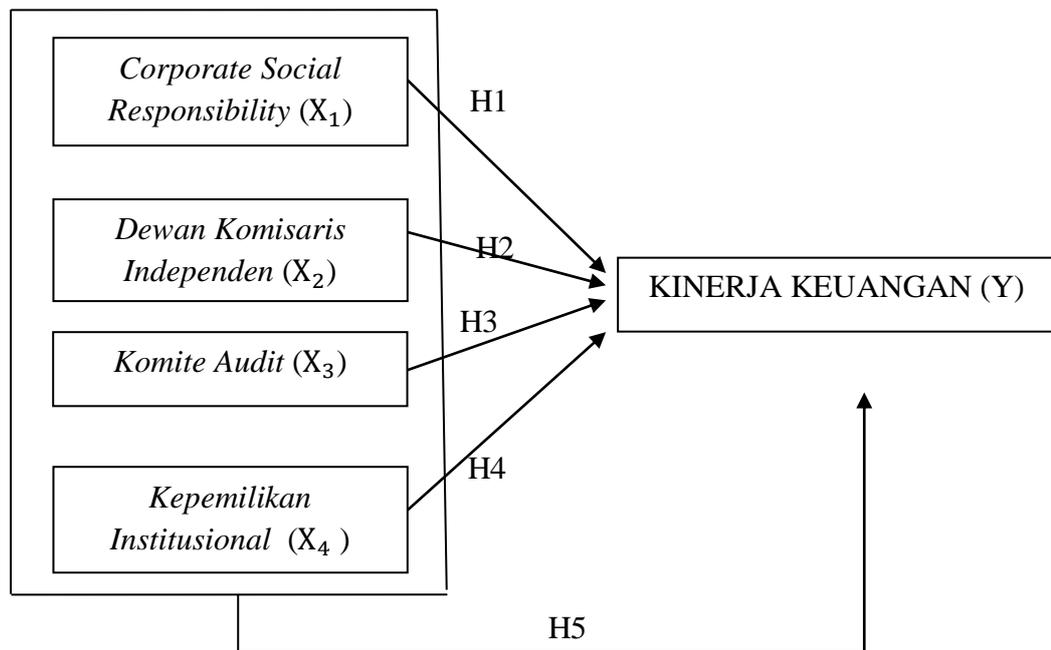
Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi adalah sebagai berikut :

NO	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1	Windy Amadhea Joesmana (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI 2013-2015	Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Dependen: Kinerja Keuangan (ROA)	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2	Andre Veno (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur <i>Go Publik</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013)	Independen : Kinerja Keuangan Dependen : Dewan Direksi, Komisaris Independen, Total Dewan Komisaris dan Komite Audit	Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Total Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan Komite Audit

				berpengaruh terhadap kinerja keuangan
3	Rilla Gantino (2016)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2008-2014	Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> Dependen : <i>Return On Earningn</i> , <i>Return On Asset</i> dan <i>Price Book Value</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap ROE, <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap ROA dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap PBV.

Sumber: Data diolah, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

1.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan diuji keberadaannya oleh peneliti. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ = Diduga *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H₂ = Diduga Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H₃ = Diduga Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H₄ = Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H₅ = Diduga CSR, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2019. Perusahaan dibidang sub sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 17 perusahaan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono. 2013).

Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019.
2. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2017 sampai 2019.
3. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menerbitkan laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah dari tahun 2017 sampai 2019.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 yaitu sebanyak 17 perusahaan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kriteria	Kriteria	Kriteria
		1	2	3
1	Astra Agro Lestari, Tbk. (AALI)	√	√	√
2	Andira Agro, Tbk. (ANDI)	√	x	√
3	Austindo Nusantara Jaya, Tbk. (ANJT)	√	√	√
4	Eagle High Plantations, Tbk. (BWPT)	√	√	√
5	Dharma Satya Nusantara, Tbk. (DSNG)	√	√	√
6	Golden Plantation, Tbk. (GOLL)	√	x	√
7	Gozco Plantations, Tbk. (GZCO)	√	√	√
8	Jaya Agra Wattie, Tbk. (JAWA)	√	√	√
9	PP London Sumatra Indonesia (LSIP)	√	√	√
10	Multi Agro Gemilang, Tbk. (MAGP)	√	x	√
11	Mahkota Group, Tbk. (MGRO)	√	√	√
12	Provident Agro, Tbk. (PALM)	√	√	√
13	Sampoerna Agro, Tbk. (SGRO)	√	x	√
14	Salim Ivomas Pratama, Tbk. (SIMP)	√	√	√
15	Sinar Mas Agro, Tbk. (SMAR)	√	√	√

16	Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (SSMS)	√	√	√
17	Bakrie Sumatera Plantations, (UNSP)	√	√	√

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan kriteria sampel diatas, maka jumlah perusahaan yang dapat diteliti adalah sebanyak 13 Perusahaan. Berikut daftar nama perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari, Tbk.
2	ANJT	Austindo Nusantara Jaya, Tbk.
3	BWPT	Eagle High Plantations, Tbk.
4	DSNG	Dharma Satya Nusantara, Tbk.
5	GZCO	Gozco Plantations, Tbk.
6	JAWA	Jaya Agra Wattie, Tbk.
7	LSIP	PP London Sumatra Indonesia, Tbk.
8	MGRO	Mahkota Group, Tbk.
9	PALM	Provident Agro, Tbk.
10	SIMP	Salim Ivomas Pratama, Tbk.
11	SMAR	Sinar Mas Agro, Tbk.
12	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana, Tbk.
13	UNSP	Bakrie Sumatera Plantations, Tbk.

Sumber: www.idx.co.id

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang dipublikasikan melalui *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang sudah dipublikasikan.

3.6 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu; variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Berikut penjelasan setiap variabel:

3.6.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lain. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti adalah: kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental

perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan.

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan pada perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yang mana kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasional perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif.

ROE merupakan salah satu alat utama investor yang paling sering digunakan dalam menilai suatu saham. *Return On Equity* (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) atas modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. ROE dihitung untuk memenuhi kepentingan pemilik atau pemegang saham, untuk memperoleh nilai *Return On Equity* (ROE) maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning after Tax (EAT)}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

Nilai *Return On Equity* yang positif menunjukkan baiknya kinerja manajemen dalam mengelola modal yang ada untuk menghasilkan laba.

3.6.2 Variabel Independen

a. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Indikator pengukuran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam penelitian ini menggunakan indikator berupa checklist Indeks, tingkat pengungkapan CSR dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

$CSRDI_j$: *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

$\sum X_{ij}$: Jumlah item yang diungkapkan

n_j : Jumlah item yang seharusnya diungkapkan, $n_j = 96$

b. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris independen dapat diukur dengan:

$$KI = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris perusahaan}}$$

c. Komite Audit

Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit. Variabel komite audit dapat diukur dengan :

$$KA = \sum \text{Komite Audit}$$

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan investment banking. Bila dihubungkan dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen yang lebih baik dibandingkan secara individu. Monitoring yang dilakukan pihak institusi tentu lebih efektif dibandingkan oleh pihak individu karena institusi memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar sehingga mampu melakukan monitoring yang lebih kuat. Hal ini menyebabkan dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih cepat, dan untuk menghindari berkurangnya relevansi dari informasi tersebut.

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham institusi lain dalam suatu perusahaan baik institusi pemerintah, institusi swasta, domestik

maupun asing yang mengawasi kinerja dari manajer perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab status terakhir dari subyek penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

3.7.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran atau profil data sampel atas data yang dikumpulkan dalam penelitian yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan meliputi :

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yang fungsinya digunakan menganalisa apakah populasi data sample pada variable dependen dan variable independen berdistribusi normal atau tidak. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bisa terutama untuk sampel kecil.

Dalam penelitian ini akan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* sebagai uji yang akan digunakan untuk menganalisis, dengan cara

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Untuk mempermudah dalam perhitungan secara statistik, maka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan di olah dengan bantuan *software* statistik SPSS 18.0 *for windows*.

3.7.2.2 Uji Multikolenieritas

Uji multikoliearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang yang memiliki kepemilikan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1 – 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Sujarweni, 2014).

3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian untuk mengetahui apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada peroides t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2009). Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi yaitu dengan menggunakan metode uji Durbin-Waston (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $d < dL$ atau $> (4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan uji Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Apabila uji tersebut tidak adanya gejala heteroskedastisitas maka model regresi tersebut telah terpenuhi.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda merupakan uji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

Sedangkan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengujian pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Model pengujian dalam penelitian ini akan dinyatakan dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan Perusahaan

α : Konstanta

b1-b4 : Koefisien Regresi

- X_1 : *Corporate Social Responsibility*
 X_2 : Dewan Komisaris Independen
 X_3 : Komite Audit
 X_4 : Kepemilikan Institusional
 e : *Error*

Analisis regresi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian statistik yang dilakukan adalah:

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ketepatan Pemikiran model (*Goodness of Fit*) atau sering disebut Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai R^2 yang semakin 0 besar atau semakin mendekati satu menunjukkan hasil regresi yang semakin baik. Hal ini berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Gozali, 2014).

Koefisien determinasi (R^2) bermanfaat untuk menjelaskan kemampuan model variasi yang terjadi dalam variabel dependen itu sendiri, setelah melakukan uji tersebut maka dapat diketahui besar variabel dependennya.

3.7.5 Uji Signifikasi Secara Parsial (Uji T)

Uji hipotesis dengan t_{hitung} digunakan untuk menguji koefisien regresi variabel independen. T_{hitung} diketahui dengan menggunakan Software SPSS 18.

Menguji apakah secara parsial (individu) variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara t_{tabel} dengan t_{hitung} . Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-2)$ dimana n adalah jumlah observasi (Sugiyono, 2013).

Dasar keputusan uji :

1. Jika $\text{Sig} < 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y .
2. Jika $\text{Sig} > 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y .

3.7.6 Uji Signifikasi Simultas (Uji F)

Menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Dimana F_{hitung} dan F_{tabel} dicari dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 18 (Sugiyono, 2013).

1. Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.